



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHOIRUL BAHRI LUBIS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 629063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.544.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1003.6 m2/384 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.250.500.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
30.500.000
3. Tanah Seluas 399 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
56.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di MANDAILING NATAL, HASIL SENDIRI
Rp. 101.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m2 di MANDAILING NATAL, HASIL SENDIRI
Rp. 106.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V 2.4 AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD) MINIBUS Tahun 2008,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.806.000.000



III. HUTANG

Rp. 210.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.596.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.